



PENDEKATAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PADA BANK SAMPAH KECAMATAN MANGGALA

Mul Khaeri Ikram

Universitas Hasanuddin, Makassar
ikrammulkhaeri@yahoo.com

Info Artikel :

Diterima : 27 Mei 2020

Disetujui : 25 Juni 2020

Dipublikasikan : 2 Juli 2020

ABSTRAK

Sampah merupakan permasalahan kompleks yang dimiliki oleh setiap kota besar. Permasalahan sampah menjadi permasalahan bersama yang membutuhkan usaha dan upaya dari masyarakat, pelaku swasta dan pemerintah untuk menanganinya. Olehnya itu, salah satu upaya Pemerintah Kota Makassar dalam penanganan sampah adalah pembentukan Bank Sampah di setiap wilayah dengan Bank Sampah Pusat dibawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Collaborative Governance lahir akibat keterbatasan sumber daya dan keuangan Pemerintah dalam kelangsungan pengelolaan Bank Sampah yang kini sudah berada di setiap Kecamatan Kota Makassar. Salah satunya adalah Bank Sampah Sektoral Manggala dibawah Kepemimpinan oleh Pemerintah wilayah Kecamatan Manggala yang kini berkolaborasi dengan PT. Pegadaian sejak tahun 2019. Prasasti kerja sama Kecamatan Manggala dan PT. Pegadaian diresmikan pada tahun 2019 dan diresmikan oleh wakil walikota Makassar yang bertema “The Gade Clean & Gold Program Pemilahan Sampah Menabung Emas PT. Pegadaian dan Kecamatan Manggala”. dalam proses kolaborasi yang berjalan, terpenuhi indikator dalam membangun komunikasi yang direfleksikan dengan penimbangan sampah melibatkan partisipasi masyarakat, membangun komitmen yang memiliki harapan dan keinginan pihak pihak yang berkolaborasi untuk memerankan pemilahan sampah sehingga volume sampah yang masuk pada TPA dapat dikendalikan, membangun kepercayaan pihak pihak yang berkolaborasi menjadi pendukung utama dalam mencapai konsistensi kinerja yang berkolaborasi, serta pemahaman dalam mencapai hasil merangkum bahwa terciptanya lingkungan yang bersih dan pemahaman masyarakat bahwa sampah dapat bernilai jual. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yaitu wawancara dan observasi lapangan.

Kata Kunci :

**Collaborative,
Governance,
Bank
Sampah,
Pemilahan
Sampah.**

ABSTRACT

Garbage is a complex problem that every big city has. The waste problem is a common problem that requires efforts and efforts from the community, private sector actors and the government to handle it. Therefore, one of the efforts of the Makassar City Government in handling waste is the establishment of a Waste Bank in each region with a Central Waste Bank under the Makassar City Environmental Service. Collaborative Governance was born due to limited resources and government finances in the continuity of the management of the Waste Bank which is now in every District of Makassar City. One of them is the Manggala Sector Waste Bank under the leadership of the Manggala District Government which is now collaborating with PT. Pegadaian since 2019. The inscription of cooperation between Manggala District and PT. Pegadaian was inaugurated in 2019 and inaugurated by the deputy mayor of Makassar with the theme "The Gade Clean & Gold Waste Sorting Program Saving Gold PT. Pawnshops and Manggala District". In the ongoing collaboration process, indicators are met in building communication which is reflected by weighing waste involving community participation, building commitments that have the hopes and desires of the collaborating parties to play a role in sorting waste so that the volume of waste entering the landfill can be controlled, building trust from parties involved. collaborating is the main supporter in achieving consistency in collaborative performance, and understanding in achieving results includes the creation of a clean environment and public understanding that waste can be of value. The research was conducted using qualitative methods, namely interviews and field observations.

Keywords :

**Collaborative,
Governance,
Waste Bank,
Waste
Segregation.**

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang terus menerus terjadi adalah permasalahan lingkungan mengenai pengelolaan sampah. Permasalahan pengelolaan sampah merupakan permasalahan yang tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja tetapi semua pihak perlu ikut terlibat dalam pengelolaan sampah. Permasalahan sampah merupakan salah satu masalah kompleks yang membutuhkan penanganan dengan cara kolaborasi khususnya untuk negara – negara berkembang. Karena permasalahan sampah pada negara – negara tersebut setiap tahunnya semakin meningkat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengolahan sampah yaitu dari paradigma kumpul–angkut–buang, menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru. Paradigma yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk, dan bahan baku industri. Pengolahan sampah dapat dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif. Dimulai dari hulu, yaitu sejak suatu produk yang berpotensi menjadi sampah belum dihasilkan. Dilanjutkan sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan, sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. (Undang Undang No 18 tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah).

Tempat Pembuangan Akhir Kota Makassar terletak di Kelurahan Tamangapa Kec. Manggala. Dengan pertambahan sampah yang masuk ke TPA semakin meningkat, maka hal inilah yang menjadi urgensi pembentukan bank sampah di kalangan masyarakat. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,5 miliar khusus untuk pembelian sampah di seluruh Bank Sampah Unit (BSU) yang tersebar di Kota Makassar (Sumber: Sindonews.com 15 Desember 2020). Menurut Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar bahwa dari pengalaman tahun sebelumnya, anggaran pembelian sampah di Bank Sampah Pusat (BSP) belum terserap secara maksimal. Dengan pengalokasian dana untuk pembelian Bank Sampah Unit ini diharapkan dapat tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, khususnya bagi masyarakat Kec. Manggala yang menerima dampak langsung dari penumpukan sampah di TPA (TribunNews 7/10/2020)

Sejalan dengan program Pemerintah Kota Makassar yakni Makassar *Green and Clean (MCG)* seluruh wilayah di Kota Makassar dihimbau untuk membenahi wilayah masing-masing agar dapat memperbaiki kualitas lingkungan Kota Makassar tentunya dengan prinsip 3R yakni *Reuse, Reduce* dan *Recycle* yang baru-baru diresmikan program Makassar Tidak Rantasa (MTR). Dalam program tersebut yang menjadi prioritas kegiatannya adalah pengelolaan sampah. Melalui bank sampah diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah persampahan dan menggandeng pihak swasta maupun sponsor untuk bersama-sama menyukseskan program pengolahan sampah melalui sistem bank sampah melalui pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut yang memprakarsai terbentuknya bank sampah di Kota Makassar sebagai solusi mengurangi sampah pada TPA Antang khususnya di Kec. Manggala. Namun, seiring perjalanan pengelolaan Bank Sampah dalam masyarakat, dapat dikatakan tidak mudah. Dalam beberapa kelurahan di Kec. Manggala yang menjalankan aktivitas bank sampah memiliki permasalahan personal dengan masyarakatnya. Kurangnya komunikasi dan pendampingan mulai dari pemilahan hingga pengangkutan, ditampung pada bank sampah dan dinilai hasilnya mengisahkan sejumlah masalah yang mengganggu jalannya proses bank sampah ini sehingga terdapat beberapa kelurahan RT/RW tidak aktif lagi menjalankan proses bank sampah.

Keberadaan bank sampah menjadi kuat dengan terbitnya peraturan walikota no 126 tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis yang mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bank Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup.

Bank Sampah adalah suatu system pengelolaan sampah kering secara kolektif mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. System ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah. Semua kegiatan dalam system bank sampah dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Seperti halnya bank konvensional, bank sampah juga memiliki system manajerial yang operasionalnya dilakukan oleh masyarakat. Jika berhasil, bank sampah bahkan dapat memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat. Dengan demikian, system bank sampah dapat dijadikan alat untuk melakukan rekayasa social, sehingga terbentuk suatu tatanan atau system pengelolaan sampah yang lebih baik di masyarakat. (Sumber: Buku Panduan system bank sampah sukses Indonesia).

Adapun lokasi yang dituju sebagai rujukan pengelolaan bank sampah di kota Makassar yaitu Kecamatan Manggala yang terbagi ke dalam 7 kelurahan yang hampir seluruh kelurahannya telah memiliki bank sampah. Total bank sampah di Kecamatan Manggala yang telah terdaftar di Yayasan Peduli Negeri adalah sebanyak 45 bank sampah unit yang tersebar di 7 kelurahan. Menurut data Penelitian oleh Andi Rahbil Fadly tentang studi pengelolaan bank sampah sebagai salah satu pendekatan dalam pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat (studi kasus bank sampah Kecamatan Manggala) dilaksanakan di 7 bank sampah unit aktif yang berdiri antara tahun 2011 sampai tahun 2016 dan terletak di 5 kelurahan, yaitu: 1. Bank sampah Lisana (Kelurahan Bangkala) 2. Bank sampah Mekar Swadaya (Kelurahan Biring Romang) 3. Bank sampah Bina Lestari (Kelurahan Tamangapa) 4. Bank sampah Bontobila (Kelurahan Batua) 5. Bank sampah Lamber Borong (Kelurahan Borong) 6. Bank sampah Samaturu (Kelurahan Tamangapa) 7. Bank Bina Manggala (Kelurahan Batua). Artinya, dari 45 unit bank sampah yang tersedia, yang secara aktif menjalankan proses bank sampah ini hanya masing-masing 1 di setiap kelurahan.

Maka dengan fenomena di atas, menurut peraturan perundang – undangan tentang pengelolaan sampah tersebut, bahwa salah satu landasan pokok pengelolaan sampah adalah adanya pembagian tugas dan peran seluruh pihak dalam pengelolaan sampah, dimana pihak – pihak yang terlibat agar pengendalian dan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik adalah:

1. Pemerintah (kementerian/ lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota).
2. Pihak non pemerintah (Dunia usaha/ lembaga privat, pengelolakawasan).
3. Masyarakat.

Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam pengelolaan sampah perlu menerapkan prinsip collaborative governance, karena pengelolaan sampah merupakan permasalahan yang menjadi kepentingan dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Ciri praktek collaborative governance diterapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 4 tahun 2011 tentang pengelolaan Sampah dimana (1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lainnya dalam pengelolaan sampah. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama dalam pengelolaan sampah. (3) Bentuk dan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. Selanjutnya, (1) Pemerintah Kota dapat bermitra dengan badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah; (2) Tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Wujud kerjasama Kecamatan Manggala dengan Pegadaian ini ditandai dengan Kecamatan Manggala salah satu kecamatan di Kota Makassar yang mempunyai bank sampah yang dibangun oleh pegadaian setelah berhasil dilaksanakan di beberapa Kota di Indonesia. Di Kecamatan Manggala mempunyai inovasi kerjasama yang cukup menarik, inovasi tersebut membantu memberikan pelajaran untuk memilih dan memilah sampah kemudian ditukar menjadi tabungan emas yang disebut dengan bank sampah sektoral clean & gold, kecamatan Manggala kota Makassar. Dilansir oleh Tribuntimur bahwa

"Pada prosesnya nanti, pihak kami akan membantu memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk mengumpulkan dan memilah sampah, kemudian ditukar

menjadi tabungan emas," tambahnya di sela peresmian Bank Sampah Sektoral Clean & Gold, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (5/3/2019).

Sementara itu, Yayasan Bosowa meresmikan program Makassar Memilah Sampah dalam pengolahan sampah di Kecamatan Manggala dengan system pembangunan berkelanjutan, dimana Untuk Makassar Memilah Sampah, pihaknya akan mengedukasi masyarakat agar bisa memisahkan sampah organik dan non organik. Project ini diakui Melinda Aksa selaku CEO Yayasan Bosowa merupakan jangka panjang dan Kecamatan Manggala yang pertama di bidik. Pemilahan Manggala dilakukan karena identik dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa.

Berdasarkan hasil Penelitian oleh Tanete Dg Maraja (2020) bahwa hambatan yang dirasakan pemerintah dalam inovasi Pengelolaan Sampah di Kecamatan Manggala, adalah sebagian masyarakat masih kurang peduli terhadap kebijakan pemerintah dalam hal ini inovasi pengelolaan sampah sehingga program inovasi pengelolaan sampah ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Manggala itu sendiri.

Maka dari itu, dengan Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Manggala dengan beberapa pelaku sector swasta ini seharusnya telah menjadi solusi yang cukup dalam memerankan pemilahan sampah. Namun, dengan fenomena di atas dengan penelitian terdahulu dimana masyarakat masih memiliki kesadaran yang lemah akan hal itu, diperlukan upaya lebih giat lagi bagi pemerintah dalam berkoordinasi lebih dalam terkait pemberian pemahaman bagi masyarakat bahwa pentingnya pemilahan sampah yang dimulai dari rumah.

Tujuan adanya kolaborasi tersebut yaitu untuk mengurangi volume sampah dan merubah mindset masyarakat untuk bisa mengelola sampahnya menjadi sumber daya melalui bank sampah. Berikut ini akan dijelaskan bukti-bukti belum tercapainya tujuan *collaborative governance* tersebut:

1. **Volume sampah yang masih tinggi.** Hal ini dibuktikan dari sumber berita online yaitu IDN Times Sul-Sel yang bertajuk "PSBB atau tidak, Produksi Sampah kota Makassar masih 900 ton perhari" dimana beberapa poin ditarik dalam artikel tersebut bahwa 1). Produksi sampah tidak berkurang, karena aktivitas masyarakat tidak banyak berubah. 2). Sampah rumah tangga masih mendominasi di Makassar.
2. **Kesadaran masyarakat akan pemilahan sampah masih rendah,** hal ini ditandai dengan dalam beberapa penelitian terkait permasalahan sampah ini masih berkisah tentang kurangnya kesadaran dan pemahan masyarakat akah pentingnya memilah sampah dari rumah.

Dalam hal ini penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut terkait pendekatan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Manggala. Penelitian ini juga dimaksudkan agar dapat menganalisis lebih dalam terkait pendekatan kolaborasi oleh Pemerintah kepada pelaku swasta dalam memerankan pemilahan sampah. Apakah telah sesuai antara pemahaman ideal normatif dan kondisi aktual empirisnya.

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut maka dapat diidentifikasi bahwa penerapan *Collaborative governance* dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah belum berhasil mencapai tujuannya yaitu mengurangi

volume sampah dan mengubah mindset masyarakat untuk bisa mengelola sampahnya menjadi sumber daya. Ketidakmaksimalan dalam kolaborasi tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor kolaborasi yang lemah diantara Stakeholders yaitu Pemerintah Kecamatan Manggala dalam hal ini Bank Sampah Unit Kecamatan Manggala, dan PT Pegadaian.

Hambatan *collaborative governance* tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Komitmen *stakeholders* terhadap tujuan kolaborasi. Komitmen terhadap tujuan pada saat kolaborasi berlangsung merupakan hal yang penting.
2. Masalah Komunikasi. Dibutuhkan komunikasi dan sosialisasi yang proaktif kepada masyarakat.
3. Dan permasalahan peran aktif masyarakat sebagai yang melaksanakan pemilahan dan pengelolaan sampah, bahwa sampai saat ini masyarakat masih kurang mengetahui tentang pengelolaan sampah rumah tangga.

Maka, dari hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Proses Kolaborasi yang terjalin antara Bank Sampah Kecamatan Manggala, Pegadaian dan Masyarakat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2008:6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode yang alamiah. Maka fenomena yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang masih memiliki kesadaran rendah akan pentingnya pengolahan sampah yang dimulai dari rumah. Fenomena tersebut kemudian melahirkan ide dan gagasan pemerintah yang bersifat kolaboratif, dimana pihak pihak yang terlibat adalah PT. Pegadaian, Bank Sampah Sektor Manggala dan keterlibatan masyarakat sebagai partisipan dalam kolaborasi ini. Hal ini tentu bertujuan sebagai umpan dalam meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengolahan sampah yang dimulai dari rumah khususnya dalam wilayah Kecamatan Manggala.

Menurut Lexy J. Moleong (2012: 330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap dua itu. Sedangkan Denzin (dalam Lexy J. Moleong, 2012: 330) membedakan empat macam triangulasi sebagai Teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Data dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara, bukti administrasi pengelolaan bank sampah dan observasi lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Manggala dibawah kepemimpinan Camat Drs Anshar Umar M.Si dan A. Fadly, S.STP, M, Si sebagai Sekretaris Camat membawahi 2 Kepala Sub Bagian, yakni Iin Nurfadillah Basri, S.STP sebagai Kasubag Umum Dan Kepegawaian dan Hj. Sitti

Rosling S.Ip sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan, serta 5 Kepala Seksi, antara lain Sofiwati, Se Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan kinerja lurah dan RT/RW, Hasanuddin L Sebagai Kepala Seksi TRANTIB dan Penegakan Peraturan daerah, A. Mulfarianti, S.STP, MAP Sebagai Kepala Seksi Perekonomian, pembangunan dan SPMI, Dra. Putriani Etna Sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan dan Drs. Muh. Saleh Sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan dan pertamanan, bersama para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Kecamatan dan Aparatur Kelurahan mewujudkan Visi Kecamatan Manggala “*mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan pemberdayaan sumber daya lokal menuju kota dunia*”

Dalam mewujudkan Visi tersebut, kecamatan manggala memiliki 7 Misi penting, yakni:

1. Menciptakan pelayanan prima terhadap seluruh elemen masyarakat
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mewujudkan tata ruang kota yang ramah lingkungan.
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, indah, aman dan nyaman.
5. Mendukung program sumber daya lokal melalui pelatihan keterampilan life skill yang bernilai ekonomi.
6. Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berbasis industri rumah tangga.
7. Pembinaan mental dan spritual antar umat beragama.

Bank Sampah Sektoral Kecamatan Manggala adalah Bank Sampah unit yang berdiri diatas lahan milik Pemerintah Kota Makassar dalam Kawasan Balai Kecamatan Manggala. Sekretariat yang dibangun berasal dari bantuan Pegadaian Kanwil IV Kota Makassar dimana *Coorporate Social Relation* Pegadaian mengusung program tentang Pegadaian Bersih-Bersih ini yang merupakan kedua kalinya di Makassar, yang sebelumnya di Kelurahan Jongaya pada tahun lalu. Program Bersih-Bersih ini bertujuan untuk mengajak masyarakat akan peduli terhadap lingkungan dengan membangun Bank Sampah. Pada prosesnya nanti, pihak Pemerintah Kecamatan Manggala akan membantu memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk mengumpulkan dan memilah sampah, kemudian ditukar menjadi tabungan emas.

Adapun Informan Penelitian ini adalah Camat Kecamatan Manggala dan pihak PT Pegadaian, dan Adapun informan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan, yaitu representasi masyarakat Manggala dan pengelola Bank Sampah.

Tabel 1. Daftar Informan

Inisial Informan	Kedudukan Informan
AU	Camat Manggala
A	Staff Administrasi UPT Bank Sampah Pusat
AS	Staff Kebersihan sekaligus Sekertaris Bank Sampah Manggala
R	Agen Pegadaian sekaligus Bendahara Bank Sampah Manggala

AM	Kepala PKBL & CSR PT. Pegadaian
W	Masyarakat
N	Masyarakat

Proses Kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah Kecamatan Manggala dalam hal ini Bank Sampah Sektoral Manggala dan Pegadaian

Menurut Alwi dalam Kolaborasi dan Kinerja Kebijakan (2018:1) Penentu dan implementer kebijakan public selalu diperhadapkan pada kompleksitas dan dinamika masalah dan pemenuhan kebutuhan public. Kondisi yang seperti ini menempatkan pemerintah tidak lagi menjadi pemain utama dalam penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan public, melainkan ia perlu bersinergi dengan actor atau para pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan tersebut. Hal ini menunjukkan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan dalam hal tersebut. Hal ini menunjukkan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan dalam hal tersebut sudah tidak bisa dihindarkan untuk mengatasi masalah-masalah public yang cenderung menjadi “*wicked problems*” dan untuk mengatasi kekurangan dan keterbatasan sumber-sumber daya yang selama ini di alami pemerintah dalam mengimplementasikan.

Selain itu, menurut Alwi (2018:1) Kolaborasi merupakan suatu perspektif dan strategi dalam manajemen dan kebijakan public untuk penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan public yang efektif dan efisien. Sebagai suatu perspektif menunjukkan kompleksitas dan dinamika public yang semakin tinggi mendorong pemerintah berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan dalam penyediaan barang-barang dan pelayanan public melalui suatu struktur jaringan public. Adanya *Public Private Partnership (PPP)*, *Community based Organization*, *inter-Organizational network* atau *Organizational Collaboration* merupakan wujud nyata penyelenggaraan pemerintahan (*Public Governance*) berfokus [ada kolaborasi antara pemangku kepentingan.

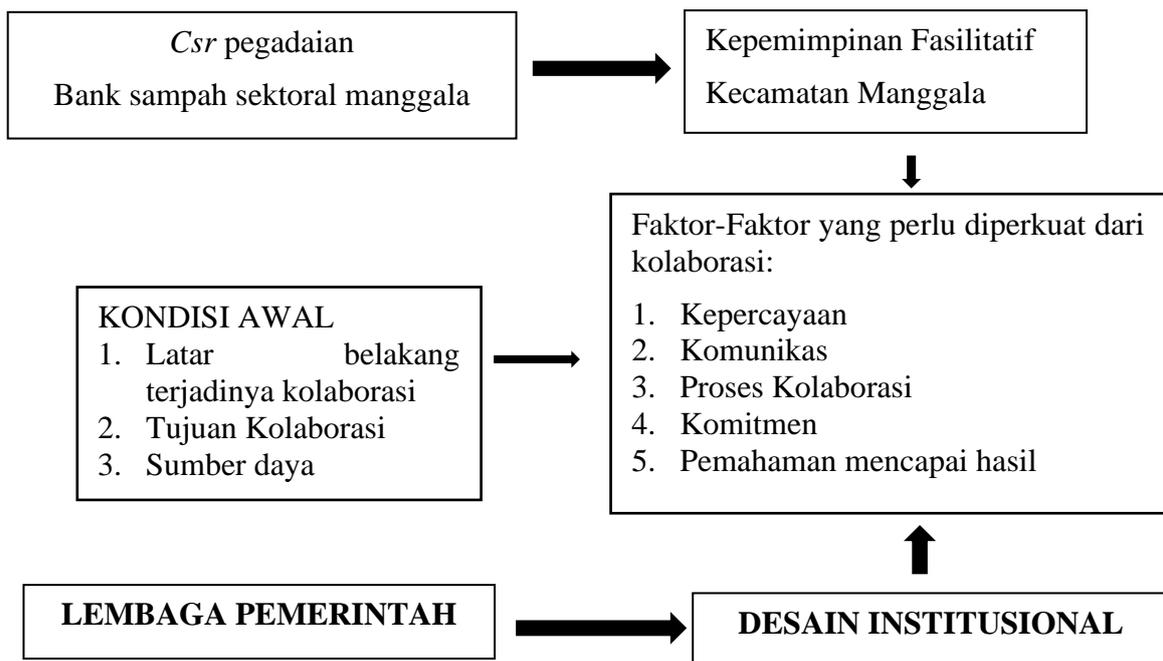
Proses Kolaborasi dimaksud adalah Model-model proses pemerintahan kolaboratif terkadang menggambarkan kolaborasi sebagai berkembang secara bertahap. Dalam kolaboratif proses pihak yang menjalin kolaborasi harus membangun komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman dalam mencapai sebuah hasil. Proses adalah hal yang penting tahapan kolaborasi.

Proses kolaborasi yang terlihat oleh peneliti ialah Ketika diadakan perlombaan penimbangan sampah terbanyak yang diadakan oleh seluruh mitra pegadaian se Indonesia termasuk Bank Sampah Sektoral Manggala. Penimbangan mulai dilaksanakan pada akhir pekan bulan juli, yaitu tanggal 3 juli 2021, 10 Juli 2021, 17 Juli 2021, dan 24 Juli 2021. Pada masa penimbangan, peneliti aktif mengamati ke Lapangan dan bertemu dengan warga yang antusias mengikuti penimbangan ini. Setiap minggu pada jam 8 pagi hingga jam 10 warga memadati Bank Sampah Sektoral Manggala dan membawa sampah yang telah dipilah untuk ditimbang.

Masyarakat yang menimbang sampahnya akan diberi pilihan untuk mengambil upah penimbangan sampahnya secara langsung atau memasukkan ke dalam buku tabungan pegadaian yang akan ditukar dengan emas.

Pemerintah yang dimaksud adalah Representasi Pemerintah Kecamatan Manggala dalam hal ini Bank Sampah Sektoral Manggala, Pihak Swasta yang dimaksud adalah PT. Pegadaian serta Masyarakat Kecamatan Manggala. Rumusan Masalah ini dimaksudkan untuk melihat Kolaborasi yang tercipta dari ketiga pelaku pembangunan diatas, yaitu suatu upaya dalam memerankan pemilahan sampah dengan prinsip *reuse, recycle dan reduce*. Adapun indicator yang ingin dicapai berdasarkan Model Kolaborasi Ansel & Gash (2012) yaitu:

Model Collaborative Governance Dalam Pengolahan Sampah Di Kecamatan Manggala



Bagan 1. Kerangka Pikir

1. Tahap Membangun Komunikasi/Dialog Tatap muka

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk perubahan dalam tata cara bersosialisasi dalam lingkup kehidupan bermasyarakat.

Hasil wawancara bersama AM pihak dari Pegadaian menjelaskan bahwa kesulitan saat ini yang dihadapi adalah tahap komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang lebih intens harus diminimalkan. Karena kondisi saat ini yang memaksa kita untuk meminimalkan bentuk sosialisasi atau kerumunan. Selaras yang dikatakan AM, MA selaku pengelola bank sampah juga mengakui bahwa saat ini sulitnya menyambung komunikasi kepada masyarakat adalah keterbatasan kondisi dimana saat ini menuntut kita untuk bersosialisasi secara terbatas. Namun, Ketika peneliti menanyakan tentang komunikasi dan koordinasi yang terjalin antara Bank Sampah Sektoral Manggala dan PT. Pegadaian, Pengelola bank sampah menjelaskan bahwa terdapat agen pegadaian yang ditunjuk pegadaian secara langsung untuk terjun langsung dalam pengelolaan bank sampah ini dan menjadi penyambung komunikasi antara bank sampah dan pegadaian.

Selain itu, seorang warga Mangga yaitu W yang ditemui pada proses penimbangan warga yang dihadiri oleh pihak pegadaian, Perwakilan Pemerintah Kecamatan Manggala dan Pihak Bank Sampah ini menjelaskan bahwa hambatan dan tantangan saat ini adalah kesadaran masyarakat. Karena program ini sudah baik, namun diperlukan lagi kesadaran dan keinginan dari masyarakat itu sendiri.

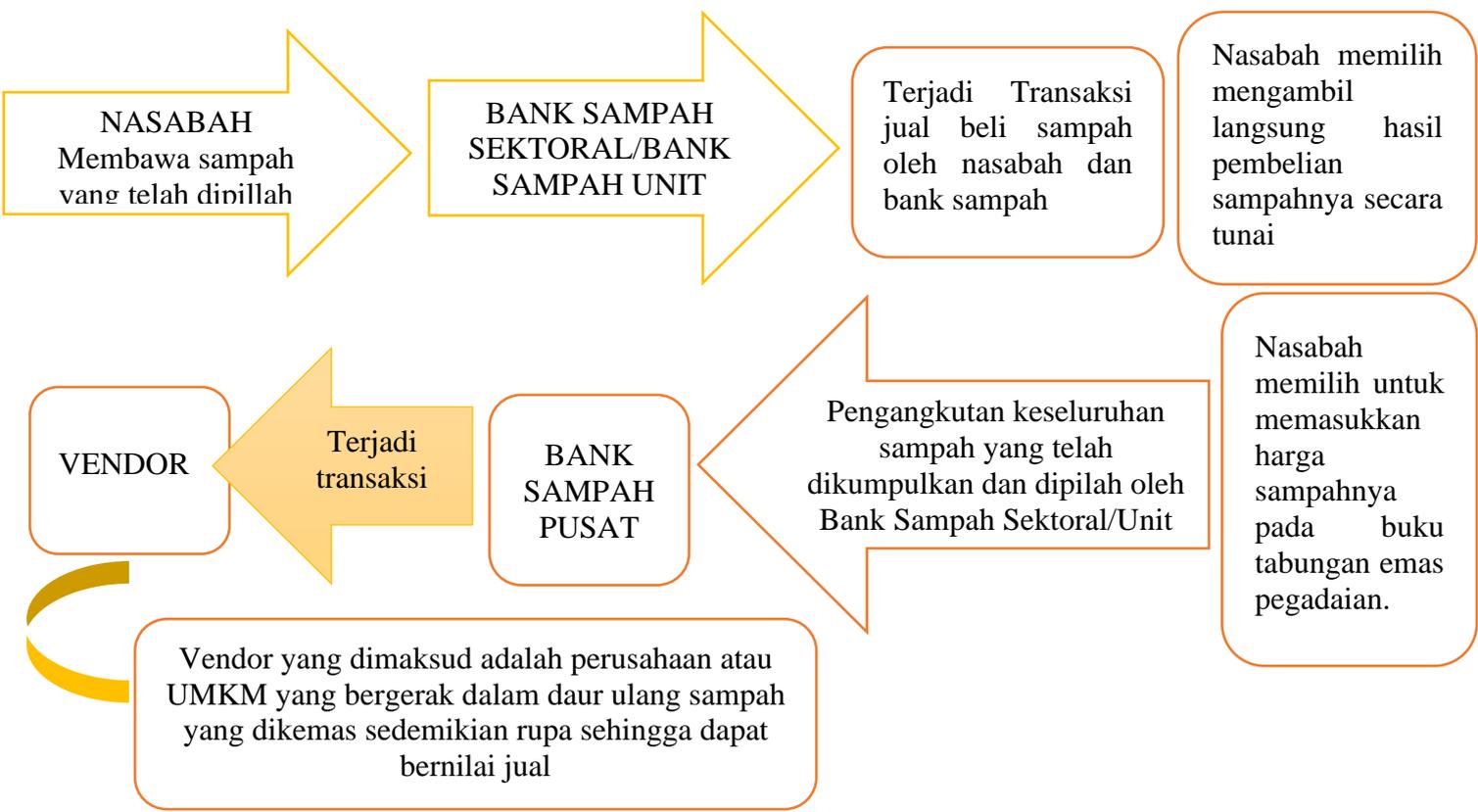
Penjelasan Wahida cukup menggambarkan bahwa permasalahan yang saat ini susah dihindari adalah kesadaran masyarakat. Dan dijelaskan pula bahwa telah ada proses sosialisasi yang terjadi namun tidak rutin mengingat kondisi yang ada saat ini menuntut kita untuk mempersempit ruang sosialisasi dalam hitungan banyak orang yang berkerumun. Hal ini juga terlihat pada saat peneliti ke lapangan pada tanggal 3 juli 2021 yaitu penimbangan pertama dalam perlombaan penimbangan sampah terbanyak oleh pegadaian dan bank sampah, masih banyak pengepul dan masyarakat yang kurang memahami protocol Kesehatan yang berlaku, artinya tidak memakai masker padahal jika diperkirakan jumlah yang hadir menimbang sampah pada minggu pertama perlombaan sekitar 30 orang dan rata rata tidak memakai masker.

Komunikasi dan Koordinasi dalam kolaborasi menjadi suatu hal yang penting dalam keberlangsungan program yang dilaksanakan. Program yang orientasinya pada kesadaran masyarakat tentu membutuhkan pendekatan komunikasi yang lebih intens dan rutin untuk selalu dikampanyekan bahwa sampah dapat bernilai tukar tinggi. Sedangkan koordinasi yang dimaksud adalah pihak yang menawarkan solusi dan yang menjalankan harus senantiasa jalan beriringan dalam batas-batas yang telah sebelumnya berdasarkan tugas dan fungsi masing masing pihak, sehingga dalam pencapaian hasil dapat terlihat dengan jelas untuk kemudian dievaluasi.

Adapun cara menukar sampah jadi emas di Pegadaian:

1. Masyarakat memilah, membersihkan, dan mengelompokkan sampah organik dan non organik.
2. Kemudian, masyarakat datang ke bank sampah milik Pegadaian yang ada di wilayah masing-masing.
3. Sampah akan dihitung nilainya oleh petugas di bank sampah.
4. Kemudian, nilai sampah akan digramkan oleh Pegadaian dan masuk tabungan emas.

Jika digambarkan secara sederhana, maka dapat diilustrasikan dalam bagan sebagai berikut.



Bagan 2 Skema Alur Transaksi Bank Sampah

Sebagaimana data yang diperoleh jumlah nasabah yang aktif menabung hasil transaksi sampahnya pada buku tabungan pegadaian terdiri dari 35 orang yang merupakan masyarakat asli Kecamatan Manggala dan telah aktif menabung sejak kolaborasi ini dilaksanakan.

Tabel 2. Akumulasi perolehan penimbangan sampah

**AKUMULASI PEROLEHAN HARGA PENIMBANGAN SAMPAH SETIAP MINGGU
BANK SAMPAH SEKTORAL MANGGALA**

Minggu ke	Jenis Sampah yang dikumpulkan (Kg)				Total Perolehan Harga	
	Plastik	Kardus	Kertas	Logam		
Minggu Pertama	345	347	434	4	Rp	2,786,500.00
Minggu Kedua	343	126	736	207	Rp	3,644,000.00
Minggu Ketiga	468	100	423	217	Rp	3,368,000.00
Minggu Keempat	353	632	514	660	Rp	6,307,000.00
Jumlah	1509	1205	2107	1088	Rp	16,105,500.00

Kemudian, dirangkum laporan hasil penimbangan sampah selama 4 (empat) minggu berturut-turut selama bulan Juli dalam perlombaan penimbangan sampah terbanyak oleh Pegadaian sebagai berikut

Dari tabel diatas maka jumlah sampah yang terkumpul selama 4 minggu penimbangan sampah dengan total plastik 1509 Kilogram, Kardus 1206 kilogram, Kertas 2107 Kilogram dan Logam sebanyak 1088 Kilogram dengan menghasilkan Rp. 16. 105. 500, 00 pengembalian modal sampah oleh Bank Sampah Sektoral Manggala yang telah di jual pada Bank Sampah Pusat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan pengamatan peneliti maka dirangkum mekanisme/alur pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Sektoral Manggala sebagai berikut;

1. Pemilahan Sampah, sesuai amanat UU no 18 Tahun 2008 pasal (22) mengenai Pengelolaan Sampah, salah satu kegiatan penanganan sampah adalah dengan kegiatan pemilahan dalam bentuk pengelompokan atau pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah. Kemudian diturunkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No 4 tahun 2011 pasal (12) di tekankan pula bahwa Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan diawali pemilahan sampah dari sumbernya sesuai dengan jenisnya. Pemilahan sampah dalam pelaksanaan atau penerapan Bank Sampah adalah dengan memisahkan jenis-jenis sampah sebelum dibawa ke bank sampah unit, dalam hal ini dipilah oleh masyarakat.
2. Tahapan berikutnya yaitu penyerahan sampah yang terbagi ke dalam dua jenis yaitu:
 - a. Penyerahan sampah dari nasabah ke Bank Sampah Unit (BSU);
 - b. Penyerahan sampah dari Bank Sampah Unit (BSU) ke Bank Sampah Pusat dan/atau Vendor;
 - c. Waktu penyeteroran sampah biasanya telah disepakati sebelumnya, misalnya dua hari dalam sepekan, namun khusus bank sampah sektoral manggala penjemputan oleh bank sampah pusat dilakukan sekali sepekan di hari senin atau selasa, hal ini dilakukan agar sampah tidak menumpuk di bank sampah sektoral sebelum tiba waktu penimbangan rutin oleh masyarakat.
3. Penimbangan sampah, sampah yang sudah disetor ke bank sampah kemudian ditimbang. Penimbangan sampah dilakukan ke setiap bank sampah unit untuk mengetahui berat sampah yang dibawa oleh nasabah bank sampah. Berat sampah inilah yang menjadi satuan ukuran dalam menentukan konversi harga sampah yang dimiliki.
4. Pencatatan adalah mekanisme berikutnya yang dilakukan sebagai wujud pembukuan dari hasil sampah yang ditabung warga. Pencatatan ini dilakukan oleh bagian pencatatan dari pengurus atau pengelola bank sampah unit (BSU) dan disaksikan langsung oleh Nasabah Bank Sampah. Berikutnya pencatatan hasil penimbangan ini akan dicatat pada buku besar Bank Sampah dan buku tabungan nasabah Bank Sampah;
5. Hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan adalah tahap pembukuan untuk nasabah bank sampah dengan menuliskan hasil tabungan sampah dan konversi uang yang didapatkan nasabah. Dalam buku ini terdapat tanggal penimbangan, jenis sampah yang ditabung, berat sampah dan konversi uangnya.
6. Pengangkutan sampah ke Bank Sampah Pusat, setelah sampah yang dikumpul dan ditimbang usai, dapat segera diangkut dari Bank Sampah Unit ke Bank Sampah Pusat. Transaksi juga terjadi antara bank sampah unit dan bank sampah pusat untuk

mengganti pertukaran transaksi antara nasabah dan bank sampah unit, selanjutnya setelah transaksi selesai antara bank sampah pusat dan bank sampah unit, saatnya bank sampah pusat memasarkan sampah yang dapat didaur ulang tersebut ke vendor-vendor atau perusahaan yang bergerak dibidang kreativitas dan kerajinan tangan untuk dapat diolah menjadi barang layak pakai baik itu hiasan rumah, pernak-pernik dll yang dapat bernilai jual.

2. Membangun Kepercayaan

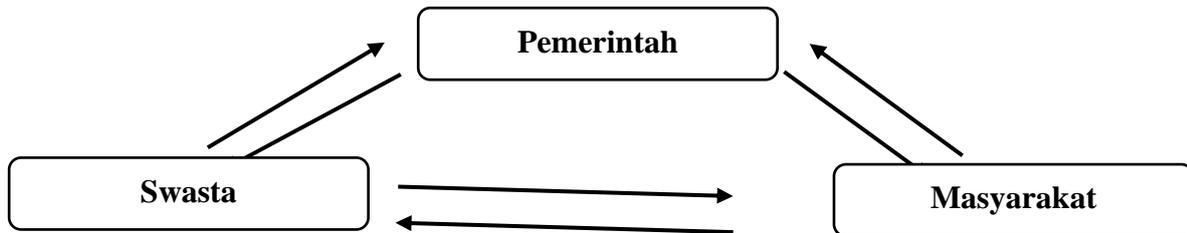
Ansel & Gash (2007) menggambarkan karakter actor-actor yang berkolaborasi bahwa buruknya rasa percaya antar stakeholder memang merupakan hal yang lumrah di awal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan semata tentang negosiasi antar stakeholder, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar para stakeholder tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam membangun kepercayaan ini, diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi.

Hal tersebut adalah *trust building*. Tentu sangat dibutuhkan dalam kolaborasi yang tercipta antara pemerintah, masyarakat dan pihak pegadaian. Dalam wawancara yang dilakukan terkait pertanyaan penelitian tentang bagaimana membangun *Trust Building* pada pihak pemerintah, pegadaian dan masyarakat itu sendiri. Jawaban di kemukakan oleh AM yang merupakan representasi pihak pegadaian mengatakan bahwa hal pertama yang dipertimbangkan untuk bank sampah sectoral manggala menjadi mitra dalam berkolaborasi mewujudkan kepedulian lingkungan, tentu rasa percaya, perlu dicatat bahwa tidak semua bank sampah di kota makassar adalah mitra Pegadaian, hanya 2 mitra yang tercatat yaitu Manggala dan Tello. Semuanya tentu dengan pertimbangan kepercayaan dan melihat berjalannya bank sampah ini berjalan secara aktif, termasuk masyarakatnya, walaupun belum semua, tapi juga mempertimbangkan bahwa lokasi Manggala saat ini adalah lokasi TPA yang membutuhkan kepedulian lebih dari kecamatan lain di Makassar, dan kami lihat Manggala punya kemauan untuk mengubah lingkungan, yang tidak hanya dikenal sebagai lokasi TPA yang suram, semrawut tapi lebih berharap kepada system pengolahan sampahnya yang pasti harus baik, disinilah pegadaian masuk untuk membantu dan memfasilitasi hal tersebut.

Selain itu, hasil wawancara bersama camat Manggala, Masyarakat Manggala dan Pengelola Bank Sampah yang menjelaskan bahwa dengan rasa kepercayaan yang terbangun dalam kurun 2019 ini dirasa cukup untuk mempertahankan kegiatan dan program ini.

Sebagaimana Menurut Chema dalam Keban (2008:38), governance merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Oleh karena itu, institusi dari governance meliputi tiga domain yaitu state (negara atau pemerintah), private sector (sektor swasta atau dunia usaha) dan society (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (Sedarmayanti, 2003:5). Sementara Ulum dan Ngindana (2017:6) menyebutkan bahwa governance mengindikasikan 'disesiminasi otoritas' dari single actor menjadi multi-aktor.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa dalam konsep governance, beberapa urusan-urusan publik yang sebelumnya dikelola oleh aktor tunggal yakni pemerintah menjadi dikelola bersama dengan aktor-aktor lain seperti sektor swasta dan masyarakat. dengan adanya governance menjadikan pemerintah tidak lagi dominan dan menciptakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan urusan-urusan public.



Bagan 3 Aktor Governance Sumber : Abidin dkk: 2013

Abidin dkk (2013:10) memetakan bahwa terdapat 3 aktor yang berpengaruh dalam proses governance. Tiga aktor tersebut yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintah. melainkan memerlukan aktor lain karena karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingannya sendiri yakni hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi.

3. Membangun Komitmen

Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam *collaborative governance*. Komitmen yang kuat dari setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Meskipun komitmen memang merupakan hal yang rumit dalam kolaborasi. Komitmen merupakan tanggung jawab dari stakeholder supaya memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang baru dan tanggungjawab tersebut perlu dikembangkan.

Dalam wawancara yang dilakukan bersama pegadaian, masyarakat, pengelola bank sampah dan camat manggala tentang hal hal lain yang perlu diperkuat dalam proses kolaborasi yang saat ini berlangsung di kecamatan manggala, maka penjelasan oleh camat manggala bahwa komitmen yang ada saat ini adalah keinginan untuk memperbaiki dan mengubah lingkungan yang aman, nyaman dan tentunya tanpa sampah. Hal tersebut lah yang mempersatukan kerja sama ini, karena adanya keinginan untuk tumbuh bersama di lingkungan yang bersih dan asri tanpa terganggu sampah. Kalaupun sampah itu ada, caranya adalah mengolah sampah itu menjadi sesuatu yang bernilai.

Selain itu, Penjelasan oleh camat manggala bahwa komitmen yang ada saat ini adalah keinginan untuk memperbaiki dan mengubah lingkungan yang aman, nyaman dan tentunya tanpa sampah. Hal tersebut lah yang mempersatukan kerja sama ini,

karena adanya keinginan untuk tumbuh bersama di lingkungan yang bersih dan asri tanpa terganggu sampah. Walaupun sampah itu ada, caranya adalah mengolah sampah itu menjadi sesuatu yang bernilai.

Pendapat diatas menyatakan bahwa kolaborasi dilakukan karena kompleksitas adanya saling ketergantungan komitmen dari tiap institusi. Kolaborasi juga dianggap muncul akibat beragamnya kepentingan antar tiap kelompok sehingga memunculkan adanya suatu komitmen yang dianggap penting dalam kolaborasi. Sehingga dengan dilakukannya kolaborasi dapat memobilisasi kelompok-kelompok kepentingan. Kolaborasi dianggap menjadi solusi untuk buruknya suatu implementasi program atau kegiatan yang dilakukan oleh satu lembaga saja, karena keterbatasan lembaga tersebut. Selain itu kolaborasi juga dianggap sebagai solusi untuk mengatasi tingginya biaya dari suatu program atau kegiatan.

4. Pemahaman Mencapai Hasil

Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, stakeholder yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka (stakeholder) capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagai pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, obktivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. saling berbagai pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah.

Pihak pihak yang berkolaborasi ini tentu dikuatkan dengan komitmen, visi misi dan tujuan yang sejalan. Dalam wawancara yang dilakukan bersama informan penelitian yaitu pegadaian, bank sampah, dan Camat Manggala terkait pertanyaan penelitian tentang bagaimana penyatuan pihak pihak dalam pemahaman mencapai hasil yang diinginkan dari program sampah tukar emas ini. Maka penjelasan Camat Manggala bahwa:

“hasil yang diharapkan saya kira tidak sulit yaitu program ini dapat bermanfaat oleh masyarakat, artinya bernilai manfaat yang luas bagi kepentingan masyarakat. Dampaknya diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat yang dimulai dari rumah. Saat itu sudah terpenuhi saya rasa barulah kita merencanakan hasil yang lebih tinggi lagi dari ini, tapi saat ini manfaatnya bisa dirasakan, contohnya sampah sudah tidak berserakan lagi, atau banyak hal lainnya lagi”(2/7/2021)

Selain itu, Muh. Ansari S juga berpendapat bahwa:

“Hasil yang merupakan harapan kita bersama adalah terciptanya pemilahan sampah yang efektif, yang dimulai dari rumah. Dan semakin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam program ini. Karena terus terang masyarakat yang berpartisipasi saat ini masih sangat minim, dan kebanyakan dari yang aktif adalah pengepul yang juga bagian dari nasabah bank sampah yang bertugas mengumpulkan sampah sampah dari rumah dan mereka yang memilah, dan dari situ mereka memiliki penghasilan. Harapannya semoga lebih banyak masyarakat yang sadar untuk memilah sampahnya dan dapat bernilai jual.”(29/06/2021)

Sementara itu, Awal Ma'ruf menyampaikan harapannya bahwa:

“kami berharap dengan adanya kolaborasi ini bisa memiliki manfaat bagi orang banyak, karena sejak awal program pegadaian bersih-bersih dirancang untuk kepentingan orang banyak yang tujuannya adalah pembaharuan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman. Artinya hasil yang ingin kita capai bersama adalah pemilahan sampah yang berkelanjutan, konsisten dan pasti yang merasakan manfaatnya ya masyarakat itu manggala itu sendiri.”(1/07/2021)

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. *Intermediate outcomes* ini muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara relative konkrit dan ketika “small wins” dari suatu kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, maka hasil yang diharapkan dalam kolaborasi antara Pegadaian, Masyarakat Manggala, Bank Sampah dan Pemerintah Kecamatan Manggala adalah:

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah.
- b. Berkurangnya volume sampah yang berserakan di jalan dan sampah yang masuk ke TPA.
- c. Masyarakat dapat berinovasi dan berkreasi dalam mendaur ulang sampah menjadi layak pakai dan bernilai jual.
- d. Sampah dapat ditukar dengan emas.
- e. Kolaborasi Pegadaian, Masyarakat, Bank Sampah dan Pemerintah Kecamatan Manggala konsisten dalam komitmen serta bersinergi dalam menjaga kebersihan lingkungan khususnya dalam memerankan pentingnya pemilahan sampah.

KESIMPULAN

Dalam Model Kolaborasi yang merujuk pada teori Ansel & Gash (2012) yang meliputi, Kondisi Awal, Desain Institusional, Kepemimpinan serta Proses Kolaborasi maka dari penelitian yang dilakukan mengenai Pendekatan Collaborative Governance antara Pemerintah Kecamatan Manggala dalam hal ini Bank Sampah Sektoral Manggala, Pegadaian, dan Masyarakat yang didasari oleh hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa dalam factor komunikasi ini tentu tidak semaksimal tahun tahun kemarin disebabkan karena situasi dan kondisi saat ini mengharuskan untuk meminimalisir kerumunan sehingga penyampaian akan program ini agar sampai dimasyarakat hanyalah komunikasi subjektif dari orang ke orang. Adapun koordinasi antara pengelola bank sampah dan pegadaian dalam pemenuhan data administrasi lainnya terkait nasabah bank sampah dan pencatatan yang telah ditimbang dikontrol oleh agen pegadaian yang bermukim di Kecamatan Manggala sekaligus pengurus aktif Bank Sampah sektoral Manggala. Faktor Kepercayaan diakui oleh sejumlah pendapat informan bahwa hal ini perlu diperkuat karena jika tidak ada saling percaya maka mustahil kolaborasi ini dapat berhasil selain itu, program ini juga banyak diharapkan oleh masyarakat dapat memberikan dampak yang benar benar dirasakan oleh semua pihak. Selain kepercayaan, Komitmen juga dianggap sebagai hal yang perlu diperkuat dan membutuhkan konsistensi dari pihak yang berkolaborasi agar tetap mematuhi tugas dan tanggung jawabnya, serta

mereka dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menjaga komunikasi dengan masyarakat agar konsisten ikut berpartisipasi dalam program the Gade Gold and Clean ini, sehingga dalam pencapaian hasil akan program ini, kesadaran masyarakat semakin meningkat, sampah tidak lagi menjadi masalah di tengah kehidupan masyarakat karena solusi yang telah ditemukan yaitu mengubah sampah menjadi tabungan emas masa depan bagi masyarakat.

SARAN

1. Membentuk relawan bank sampah yang berasal dari pemuda(i) aktif Kecamatan Manggala yang memiliki ketertarikan dalam kepedulian lingkungan sehingga relawan yang dibentuk dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa harus mengumpulkan masyarakat dalam satu tempat, artinya relawan yang dibentuk ini akan diberikan wilayah khusus untuk memberikan contoh pemilahan sampah yang baik dan mengkampanyekan program pegadaian yang lebih detail.
2. Memberikan pelatihan kecil dan bertahap bagi masyarakat dalam mengolah sampah basah rumah tangga yang tidak masuk dalam spesifikasi penimbangan sampah tukar emas, yaitu sampah basah rumah tangga ini dapat diolah menjadi pupuk kompos.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, Chris & Gash, Alison. (2012). Collaborative Governance in theory and Practice.” *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Abidin, Yusuf Zaenal, Beni Ahmad Saebani, 2013. Pengantar Sistem Sosial Budaya di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.
- Alwi. 2018. Kolaborasi dan Kinerja Kebijakan. Makassar:Kedai Buku Jenny.
- Keban, Yeremis, (2008), Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Gava Media, Yogyakarta
- Moleong, Lexy. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup no 13 tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah.
- Peraturan Walikota nomor 126 tahun 2016 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan tata kerja unit pelaksanaan teknis bank sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.
- Peraturan Daerah Kota Makassar No 4 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
- Sedarmayanti. 2003. Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: PT Mandar Maju.
- Ulum, Ngindana. 2017. Environmental Governance :Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup. Jakarta:Gramedia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012.